



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZULKARNAIN
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN - PENGADILAN NEGERI
SANGGAU - PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
**Tanggal / Tahun
Pelaporan** : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN



**IKHTISAR LHKPN a.n ZULKARNAIN
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2021)
NIK 6171013007850001**

1. DATA PRIBADI

Nama	:	ZULKARNAIN
NIK	:	6171013007850001
No KK	:	6171012609130006
NPWP	:	885368852703000
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	PONTIANAK/30 Juli 1985
Status Nikah	:	Menikah
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	Jl. Tanjungpura Gg.Tiga, No.21, PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
Nomor Handphone	:	082253717142
Email	:	arifachmadzul@gmail.com
NHK	:	797590
Bidang	:	YUDIKATIF
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Jabatan	:	KUASA PENGGUNA ANGGARAN - PENGADILAN NEGERI SANGGAU - PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Tanggal Laporan	:	31 Desember 2021
Tanggal Kirim	:	27 Januari 2022
Status	:	Proses Verifikasi



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
	Sub Total	Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 200.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 0
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 0
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 1.200.000
	Sub Total	Rp. 201.200.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 400.000.000
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 400.000.000

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
1	Jenis : RUMAH DINAS Keterangan : Rumah Dinas Type 70	Pengadilan Negeri Sanggau	Rumah Dinas Type 70
2	Jenis : MOBIL DINAS Keterangan : Toyota Kijang	Pengadilan Negeri Sanggau	Toyota Kijang
3	Jenis : JAMINAN KESEHATAN Keterangan : BPJS Kesehatan	Pemerintah RI	BPJS Kesehatan



8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 710.000.000	Rp. 778.000.000	Rp. -68.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.